

PERAN LEMBAGA KEBUDAYAAN DAERAH MALUKU (LKDM) DALAM MENGAKTUALISASIKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA DI MALUKU DAN SUMBER DAYA BUDAYA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sihasale W.R.

I. Peran LKDM

A. Pendahuluan

Provinsi Maluku yang disebut pula sebagai wilayah seribu pulau, merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Provinsi ini terbentuk dari teritori-teritori yang didiami oleh berbagai sub-suku bangsa, dan lazim mengklaim diri sebagai kelompok-kelompok yang menguasai teritori-teritori dimaksud (hak ulayat).

Sebagai sebuah wilayah kepulauan yang dipersatukan oleh proses politik secara nasional, realitas sosial budaya di Maluku, pada dasarnya bersifat multi kultur dan berbagai sub-etnik, dicirikan oleh simbol-simbol adat yang merepresentasi wilayah-wilayah kebudayaan pada masing-masing pulau dan atau gugus pulau, yang diakui mengandung di antaranya sejumlah kesamaan maupun perbedaan.

Dinamika politik, sosial dan ekonomi yang berlangsung sejak kemerdekaan nasional hingga kini, telah ikut memberi kontribusi bagi terbentuknya satu identitas budaya sebagai *orang Maluku* yang mengacu pada puncak-puncak kebudayaan - hasil dari interaksi yang dinamis – membentuk representasi kolektif sebagai nilai-nilai utama, yakni Siwalima.

Dalam konteks pembangunan yang senantiasa bermakna transformatif, nilai-nilai lokal tidak jarang harus berhadapan dengan nilai-nilai global, yang kemudian berdampak pada perubahan sikap atau cara pandang *orang Maluku* terhadap realitas lingkungannya, baik dalam interaksi dengan sesama *orang Maluku*, secara nasional maupun internasional. Perubahan sikap atau cara pandang dimaksud, di satu pihak dapat dinilai sebagai suatu proses yang wajar dan alamiah; tetapi di lain pihak, mengandung

pula resiko terhadap degradasi nilai-nilai lokal baik sebagai simbol identitas bagi pendukung suatu kebudayaan di Maluku, maupun beresiko terhadap kekuatan-kekuatan kohesif (*social capital*) yang mempersatukan *orang Maluku*.

Pemikiran yang dikemukakan di atas, tidak berarti bahwa *orang Maluku* sebagai suatu kesatuan wilayah kebudayaan harus secara eksklusif membentengi dirinya dari dinamika perubahan. Sebaliknya, realitas yang dikemukakan tersebut harus dipandang sebagai stimulan yang menggerakkan energi pikir secara kreatif guna menemukan format yang tepat untuk memfasilitasi dinamika perubahan di atas tatanan nilai budaya lokal yang telah diakrabi turun-temurun.

Sehubungan dengan obsesi di atas, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku (LKDM) dibentuk dan diberi tugas serta mengemban tanggung jawab untuk mencari, menemukan, dan merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang adaptif dengan nilai-nilai lokal, dan fungsional terhadap proses-proses pembangunan yang mensejahterahkan masyarakatnya di atas kekuatan nilai budaya lokal. Mandat ini seyogianya dilihat sebagai peran dalam rangka melakukan “misi suci” yang dipercayakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh masyarakat Maluku kepada LKDM demi dan atas nama kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat adat di Provinsi Maluku.

Untuk dapat merealisasikan obsesi tersebut secara tepat sasaran dan tepat guna, maka LKDM memerlukan suatu *platform* sebagai basis pengembangan gagasan-gagasan kreatif yang memungkinkan LKDM dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab memenuhi panggilan “misi suci” yang diembannya. Dalam kerangka kepentingan mengembangkan peran inilah, maka Visi dan Misi LKDM dapat dikemukakan sebagaimana tertera di bawah ini.

B. Visi dan Misi LKDM

1. Visi

Terpeliharanya Budaya Orang Maluku Sebagai Simbol Identitas dan Kekuatan Pembangunan dalam dinamika perubahan lokal, nasional dan global

“Terpeliharanya Budaya *Orang Maluku*”, pada dasarnya bermakna konservasi(perlindungan), restorasi(perbaikan), dan pengembangan nilai-

nilai budaya lokal (*orang Maluku*) yang potensial dapat ditumbuh-kembangkan dan dijadikan sebagai modal sosial (termasuk di dalamnya modal kultural), sehingga *orang Maluku* mempunyai cukup kapasitas dalam merespons perubahan sosial budaya di tengah dinamika pada aras lokal, nasional dan global.

Dengan kapasitas sosial budaya yang demikian, maka diharapkan pembangunan tidak lagi dilihat sebagai suatu proyek yang bersifat replikatif; sebaliknya, tersedia cukup kecerdasan sosial di dalam masyarakat untuk secara partisipatif ikut memberi kontribusi dalam rancang-bangun proses pembangunan daerah yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya lokal.

2. Misi

- a) Melakukan inventarisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya daerah, termasuk seni, ilmu, dan pengetahuan yang adaptif dengan – dan fungsional bagi kebutuhan pembangunan daerah yang maju dan moderen.
- b) Melakukan identifikasi dan mengembangkan potensi pariwisata yang sesuai karakteristik lingkungan kepulauan berbasis budaya setempat bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c) Menggalang dan mengkonsolidasi seluruh potensi sosial budaya sebagai kekuatan kohesif guna menciptakan tatanan masyarakat yang stabil dalam kerangka mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan (*sustainable peace*).
- d) Menggali dan mendorong potensi partisipatif masyarakat berbasis budaya daerah yang mampu mengakselerasi proses pembangunan menuju masyarakat Maluku yang aman, damai, adil dan sejahtera.
- e) Mengembangkan budaya tertib sosial dan kesadaran hukum, baik dengan mengacu pada hukum positif yang berlaku maupun hukum adat yang masih ada, diakui, hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

C. Arah Kebijakan Program Tahun 2007 – 2009

Berdasarkan Visi dan Misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka Arah Kebijakan Program dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang (tahun 2007 – 2009) adalah:

- a) Konsolidasi institusi didukung dengan sistem dan peralatan kerja yang moderen dalam rangka menghasilkan kinerja LKDM yang efektif dan efisien.
- b) Merangsang peningkatan kesadaran masyarakat tentang simbol-simbol sosial budaya *orang Maluku* yang dapat dijadikan sebagai atribut identitas dan kekuatan kohesif yang mempersatukan berbagai kepelbagaian (multi kultur dan berbagai sub-etnik) di dalam masyarakat Maluku.
- c) Menggali nilai-nilai sosial budaya dan mendorong upaya-upaya untuk melakukan konservasi, restorasi dan revitalisasi budaya baik yang bersifat materiil maupun immateriil.
- d) Mendorong upaya-upaya masyarakat untuk mendayagunakan aset budaya yang dimiliki dalam kerangka peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

D. Program Tahun 2005 – 2007

Peran LKDM dalam rangka mengaktualisasikan kearifan lokal dan pengembangan budaya di Maluku, mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan LKDM untuk kurun waktu lima tahun, yang dilaksanakan secara bertahap (Tiga tahunan). Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari pada bidang-bidang (Administrasi Keuangan, IPTEK, Adat Istiadat – Agama dan Etika, Seni, Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional, serta bidang Parawisata).

Program dan kegiatan yang dilakukan berupa penelitian, indentifikasi, infentarisasi, penulisan buku, seminar-seminar, menjalin kerjasama dengan Badan atau Dinas terkait untuk merumuskan kebijakan pembangunan, Selain itu hasil-hasil penelitian dan inventarisasi maupun indentifikasi juga dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui buku-buku. Pencapaian hasil dari pada setiap pelaksanaan program, baik yang dilakukakan LKDM maupun melalui kerjasama dengan Badan atau Dinas terkait, telah memberikan kontribusi penting dan berharga kepada Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka merencanakan dan membuat suatu kebijakan pembangunan. Respons positif pemerintah Provinsi dapat terlihat dengan adanya alokasi anggaran melalui APBD atau lainnya (sekalipun masih relative kecil) untuk memebiayai program yang direncanakan oleh LKDM. Artinya pemerintah menyadari bahwa pengembangan budaya di Maluku

adalah sesuatu yang strategis demi untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu LKDM, dalam berbagai kesempatan selalu memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Maluku agar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianggap penting, ada baiknya mengedepankan tema – tema yang berkaitan dengan Budaya dan berfocus kepada pengembangan budaya. Upaya – upaya LKDM ini menjadi dorongan kuat kepada pemerintah Provinsi Maluku, sebagai contoh, dalam memperingati HUT I Provinsi Maluku pada usi ke 60, tahun 2005, dilaksanakan dengan focus pada aktualisasi dan pengembangan budaya di Maluku, melalui kegiatan seminar dan diskusi tentang budaya Maluku. Kegiatan-kegiatan juga melibatkan berbagai lapisan masyarakat (perwakilan tokoh masyarakat, adat, unsur pendidikan, pemuda, perempuan dll dari kota dan Kabupaten seluruh Maluku). Dilakukan kegiatan perlombaan, dengan mata lomba yang berciri khas Maluku. Puncak dari semua itu lahirlah PERDA 14 Tahun 2005 tentang Kembali kepada Negeri.

II. Sumber Daya Budaya dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sumber daya budaya Maluku diciptakan oleh nenek moyang kita untuk memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, apakah itu yang berkaitan dengan kebutuhan akan penataan social kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya alam, hukum dan politik pemerintahan, ataupun aktivitas – aktivitas ekonomi, jasa (tenaga kerja) maupun keamanan. Tujuan dari pada semua itu yang nenek moyang inginkan adalah terciptanya suatu kondisi dan situasi yang memenuhi tingkat stabilitas tertentu pada berbagai aspek kehidupan. Produk-produk budaya yang diciptakan memiliki spirit dan tujuan yang sama antara satu sub etnik dengan sub etnik yang menyebar di berbagai belahan bumi Maluku, yang berbeda mungkin menyangkut penamaan atau penyebutan local. Dalam pembahasan sebentar nanti, ada baiknya saya mengambil contoh untuk pembahasan pada produk budaya yang paling sering dibicarakan oleh masyarakat umum. Tetapi sebelum mengkaji lebih dalam tentang benang merah antara sumber daya budaya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terlebih dahulu akan ditampilkan sumber daya budaya yang dipilih untuk dibahas.

A. Profil Sumber Daya Budaya

- a. Klen / Matarumah = Geneologis, Unit produksi / Basis social kecil (Struktur Pengelompokan).
- b. Soa = Geneologis, Basis social sedang (Struktur Pengelompokan).
- c. Uli = Geneologis Teritorial / Ikatan budaya, Kekeabatan (Penyatuan menyeluruh).
- d. Latupati = Simbol Kekuasaan / Forum Raja-raja / Politik Kekuasaan Regional
- e. Pela = (Sosial- Budaya)
- f. Sasi (Hukum dan Pelestarian Lingkungan / SDA)
- g. Papaplele = (Ekonomi dan Kekuatan Jaringan)
- h. Badati = Institusi Sosial / Keamanan pangan (*Sosial, Ekonomi*)
- i. Maano = Institusi Sosial / Keamanan Pangan
- j. Masohi / Penyediaan Tenaga Kerja (Reprocitas / imbal-balik)

B. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Produk budaya (sumber daya budaya), yang dikemukakan diatas sering orang memaknainya terlalu sederhana, sehingga berpengaruh terhadap penggunaan sehari-hari. Kekeliruan dari pemaknaan yang dangkal, maka membuat sumber daya budaya tersebut mengalami degradasi atau tidak memiliki kekuatan berarti. Dengan demikian sumber daya budaya akan kehilangan nilai-nilai potensial yang terkandung didalamnya. Sumber daya budaya tersebut juga tidak mampu untuk beradaptif dengan perubahan-perubahan yang terjadi (global, nasional, regional).

Realitas yang kita temukan adalah bahwa beberapa sumber daya budaya yang potensial tidak dapat digunakan dalam aktivitas manusia pada aspek kehidupan tertentu di zaman modern saat ini, oleh daya kompensasi (menjawab kebutuhan situasi) lemah. Persoalan yang kita hadapai sekarang adalah bagaimana, menggali ulang nilai-nilai yang tersembunyi didalamnya.

- a. Klen / Matarumah mengandung kekuatan ikatan yang kuat, sehingga semua anak-anak Matarumah tetap memiliki hubungan yang kuat dan teratur, kerana spirit yang terkandung itu terjaga. Satu hal penting menunjukkan bahwa klen (famili) adalah unit produksi cakupan negeri.
- b. Tingkatan luas dari itu adalah Soa, untuk saat sekarang kedua bentuk sumber daya budaya ini, dapat dipakai sebagai strategi pendekatan

untuk menjawab persoalan pembangunan, terutama persoalan menyangkut bagaimana melibatkan masyarakat secara partisipatif (baik kelompok kecil, maupun secara menyeluruh). Kita temui bahwa upaya-upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pembentukan kelompok usaha kebanyakan gagal, atau tidak bertahan lama (tani, nelayan, koperasi) alias bubar, dan bahkan berdampak negatif pada stabilitas negeri/desa. Kegagalan terjadi oleh karena pemerintah tidak menggunakan sumber daya budaya, tetapi melakukan pendekatan menurut **kesamaan profesi**.

Pengalaman kami dan tim selama dua tahun melakukan uji coba, pada dua tempat berbeda (Kota / Kabupaten) bagaimana melakukan kegiatan pembangunan negeri/desa dengan menggunakan pola pendekatan *matarumah dan soa*, ternyata itu berhasil, dan sekarang pola itu sedang digalakan oleh pemerintah kedua wilayah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Papaplele, adalah suatu kegiatan ekonomi masyarakat bawah yang dapat diambil spiritnya, papalele dapat bertahan sampai sekarang oleh karena memiliki keunggulan tertentu, yang tidak ada pada kelompok usaha ekonomi lain. Papaplele dapat dimodifikasi untuk menjadi kegiatan ekonomi yang handal, **sifat-sifat dasar papalele** yaitu, tingkat daya tahan, kekompakan anggota kelompok, jaringan, nilai kejujuran adalah prasyarat utama.

Papalele dapat diperluas dan untuk dijadikan kekuatan ekonomi masyarakat, apabila sifat **kompetisi individu untuk kemajuan kelompok** ditingkatkan, (diperkirakan lemah dalam kompetisi) begitu pula perluasan dan penambahan kekuatan jaringan papalele / mata rantai maka akan menjadi usaha yang besar, oleh karena dasar ikatan papalele adalah klen / matarumah.

- d. Badati dan Maano, adalah sumber daya budaya yang dibangun untuk menjaga keamanan pangan suatu negeri, atau kelompok masyarakat tertentu yang ada di negeri, (kebanyakan anggotanya atas dasar matarumah atau keluarga luas).

Dengan strategi masyarakat yang demikian maka, kualitas hidup masyarakat suatu negeri tetap akan terjamin. Persoalan pembangunan sekitar kekurangan

pangan yang terjadi di masyarakat, dapat mengambil model kedua sumber daya budaya tersebut sebagai strategi pendekatan pemecahan masalah atau antisipasi gejala kekurangan pangan.

- e. Masohi, ini merupakan bentuk pertukaran tenaga kerja yang terjadi di dalam suatu negeri, pergerakan selalu meliputi dua aspek utama yaitu aspek sandang dan pangan (biking kabong baru, atau bangun rumah baru).

Kegiatan masohi yang dilakukan oleh masyarakat tidak memikirkan imbalan (berupa uang atau barang lain), sifat dasar Masohi yaitu beban kerja dirasakan bersama (mengandung rasa tanggungjawab bersama), **tidak ada istilah pancuri tulang** dalam aktivitas masohi. Beberapa sumber daya budaya diatas telah memberikan sedikit gambaran bahwa, strategi peningkatan kualitas manusia Maluku telah dibangun oleh nenek moyang kita sejak tempo dulu dan memiliki daya adaptif yang fleksibel (kemampuan menyesuaikan) terhadap perubahan telah teruji, bahkan dapat dipergunakan untuk melakukan aktivitas pembangunan sekarang ini, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di kota maupun pada daerah jauh dari pusat kota. Kurang lebih penjelasan dalam makalah ini dapat kita secara bersama menyempurnakannya, melalui pemikiran – pemikiran yang kreatif, mengingat setiap orang tidak terkecuali tidak lepas dari kekurangan.